Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (82-94)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.30809

ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS PADA LINTAS JENJANG PENDIDIKAN DI YOGYAKARTA

*Siti Zainab[1], Subiyantoro[1]

[1]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, DIY Yogyakarta, Indonesia
*Corresponding author: zayna.na128@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received : 01-01-2026
Revised : 12-04-2026
Accepted : 16-04-2026
Published : 15-12-2026

Keywords:
Policy Analysis, Free Nutritious Meals, Cross-Level Education, Food Safety, Yogyakarta.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) represents a strategic government intervention mandated by Presidential Regulation No. 83 of 2024 to address the double burden of malnutrition among school-aged children in Indonesia. However, its operational implementation has encountered substantial managerial challenges that risk undermining policy objectives. This study examines MBG policy implementation through a procedural policy analysis framework integrating intellectual and political activities across educational levels, including kindergarten, Islamic primary school, junior high school, and senior high school in Yogyakarta. Using a qualitative intrinsic case study design, data were collected through in-depth interviews, 30-day participatory observation, and document analysis. Findings reveal critical deficiencies in daily supervision and logistics forecasting. Key results indicate food safety incidents, including biological contamination in vegetables and distribution of unfit fruits, stemming from weak quality control at the provider level. Distribution timing inconsistencies disrupted learning activities, particularly at secondary levels. Procedural policy analysis further reveals that existing monthly digital evaluation mechanisms lack responsiveness to daily incidents requiring immediate intervention. This study concludes that without differentiated management strategies across educational levels and strict service guarantee enforcement, MBG program effectiveness will continue to deteriorate. It is recommended that program administrators implement real-time monitoring systems and empower schools to reject food deliveries that fail to meet established food safety standards.

PENDAHULUAN

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar strategis yang saling terkait erat dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berkelanjutan menuju realisasi Visi Indonesia 2045. Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa tantangan kesehatan di kalangan anak usia sekolah di Indonesia masih kompleks. Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi stunting belum menurun secara signifikan, berada di angka 21,5% pada tahun 2023 dan hanya menurun sedikit menjadi 19,8% pada tahun 2024. Situasi ini semakin diperparah oleh munculnya beban ganda malnutrisi, yang tercermin dalam prevalensi obesitas sebesar 19,7% pada kelompok usia yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi gizi konvensional telah mencapai batas efektivitasnya, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan akurat. Sebagai tanggapan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang menempatkan gizi sebagai prioritas nasional melalui mekanisme Bantuan Pemerintah yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Program Gizi (*SPPG*) (Sari & Rachmawati, 2020).

Keberhasilan kebijakan tingkat makro ini sangat bergantung pada efektivitas manajemen operasional di tingkat mikro, khususnya di

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (82-94)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.30809

lembaga pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi kompleksitas manajerial yang cukup besar, termasuk masalah yang berkaitan dengan keakuratan data penerima manfaat, ketepatan waktu distribusi, dan mekanisme pengendalian mutu. Tantangan utama bukan berasal dari kekurangan regulasi, melainkan dari inkonsistensi dalam penegakan standar mutu dan praktik kebersihan di lapangan. Ketidakberaturan dalam jadwal distribusi dan temuan kontaminasi biologis pada makanan menunjukkan kesenjangan antara standar kebijakan dan realitas implementasi. Tanpa evaluasi yang komprehensif dan tepat waktu, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak kontraproduktif terhadap kesehatan dan kenyamanan belajar siswa (Talitha dkk., 2025).

Sejumlah literatur yang berkembang selama lima tahun terakhir telah meneliti efektivitas program makan siang berbasis sekolah. Sebuah studi oleh Suryana dkk. (2021) yang diterbitkan dalam *Journal of Food and Nutrition* menunjukkan bahwa program pemberian makanan tambahan memberikan kontribusi positif terhadap konsentrasi belajar siswa, meskipun seringkali dibatasi oleh keterbatasan rantai pasokan. Sementara itu, Wandini (2022) menyoroti pentingnya keragaman menu untuk anak usia dini sebagai strategi untuk mencegah neofobia makanan. Secara global, bukti empiris menunjukkan bahwa program makan siang sekolah tidak hanya berdampak pada asupan gizi tetapi juga pada kehadiran dan capaian akademik siswa. Alderman dan Bundy (2012) dalam tinjauan kebijakan internasional menegaskan bahwa program makan sekolah yang dirancang tanpa diferensiasi berdasarkan jenjang pendidikan dan kebutuhan kelompok usia cenderung menghasilkan pemborosan sumber daya dan rendahnya efektivitas program. Bundy et al. (2018) melalui laporan komprehensif *World Bank* juga mencatat bahwa tantangan utama implementasi program makan sekolah di negara berkembang bukan terletak pada regulasi, melainkan pada lemahnya kapasitas manajemen operasional di tingkat sekolah dan inkonsistensi pengawasan mutu pangan. Namun, sebagian besar studi yang ada cenderung berfokus pada satu tingkat pendidikan, khususnya sekolah dasar. Studi ini berupaya mengatasi kesenjangan penelitian ini dengan melakukan analisis lintas tingkat yang mencakup taman kanak-kanak, sekolah dasar Islam (MI), sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan Prosedur Analisis Kebijakan yang mengintegrasikan aktivitas intelektual dan politik untuk secara sistematis meneliti tantangan operasional di bawah koordinasi sebuah yayasan pendidikan di Yogyakarta (Dewi dkk., 2024).

Isu kebijakan yang diidentifikasi dalam implementasi Program MBG meliputi kelemahan dalam fungsi perencanaan, yang sebagian besar masih bersifat top-down. Dominasi SPPG dalam menentukan siklus menu mingguan membatasi partisipasi tingkat sekolah dalam mengadaptasi standar nutrisi terhadap karakteristik dan kebutuhan spesifik siswa di setiap tingkat pendidikan. Dari segi implementasi (*pelaksanaan*), penggunaan wadah makanan yang dapat digunakan kembali mencerminkan pendekatan yang ramah lingkungan; namun, variabilitas waktu pengiriman, mulai dari pukul 9:00 hingga 10:00 pagi, telah ditemukan secara signifikan mengganggu kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Tanpa adanya Prosedur Operasi Standar (SOP) distribusi yang ketat dan terstandarisasi, program yang dirancang untuk bersifat promotif mungkin secara tidak sengaja menghambat efektivitas pengajaran di kelas (Dewi dkk., 2024).

Kelemahan paling kritis dalam struktur manajemen terlihat pada fungsi pengawasan dan evaluasi (*pengendalian*). Insiden penurunan kualitas pangan, seperti kontaminasi sayuran dengan larva dan distribusi buah-buahan yang tidak layak konsumsi, menunjukkan kegagalan dalam pengendalian mutu di tingkat pemasok. Lebih lanjut, ketergantungan pada evaluasi bulanan yang dilakukan melalui Google Forms

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (82-94)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.30809

dianggap kurang responsif terhadap masalah gizi yang mendesak. Keterbatasan ini diperparah oleh tidak adanya kebijakan penggantian makanan ketika standar kualitas tidak terpenuhi. Kondisi ini menggarisbawahi perlunya reformasi manajemen melalui penerapan sistem evaluasi waktu nyata dan klausul jaminan layanan untuk memastikan perlindungan hak-hak siswa sebagai penerima manfaat kebijakan publik (Lestari & Yuwono, 2025).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, studi ini merumuskan pertanyaan utama tentang bagaimana implementasi kebijakan Makanan Bergizi Gratis dapat dianalisis melalui prosedur manajemen yang meliputi perencanaan, implementasi, dan pengawasan di berbagai tingkatan pendidikan di Yogyakarta. Secara khusus, studi ini bertujuan untuk menguji sejauh mana aktivitas intelektual dalam peramalan dan pemantauan dapat mengurangi risiko kegagalan produk gizi dalam praktik. Temuan diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan dengan kebijakan bagi para pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu yang lebih integratif, adaptif, dan responsif yangAddressing kebutuhan beragam siswa dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengelolaan kebijakan Makanan *Bergizi Gratis* (MBG). Desain penelitian disusun secara sistematis untuk memastikan transparansi prosedural dan kemampuan replikasi untuk studi masa depan yang dilakukan dalam konteks yang sebanding. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji alur aktivitas intelektual dan aktivitas politik yang tertanam dalam manajemen operasional lintas tingkat di lembaga pendidikan yang beroperasi di bawah sebuah yayasan di Yogyakarta. Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan berurutan, dimulai dengan fase pra-lapangan untuk mengidentifikasi dan memetakan lokasi penelitian, diikuti oleh fase lapangan untuk pengumpulan data primer, dan diakhiri dengan fase analisis data yang berlandaskan kerangka kebijakan publik (Jannah dkk., 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari empat lembaga pendidikan yang mewakili berbagai tingkatan sekolah, yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar Islam (*Madrasah Ibtidaiyah*), sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Partisipan dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan informan dipilih berdasarkan keterlibatan fungsional mereka dalam struktur kebijakan MBG. Informan kunci meliputi empat kepala sekolah sebagai pengambil keputusan tingkat unit, empat guru koordinator gizi sebagai pelaksana tingkat lapangan, satu manajer Satuan *Pelayanan Program Gizi* (SPPG) sebagai penyedia layanan, dan perwakilan orang tua sebagai aktor pengawasan eksternal. Selain data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, data sekunder dikumpulkan dalam bentuk dokumen peraturan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Prosedur Operasi Standar (SOP) distribusi pangan, dan catatan evaluasi harian sekolah (Lendra dkk., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan. Pertama, wawancara mendalam dilakukan menggunakan panduan wawancara yang telah divalidasi, dengan fokus pada proses perencanaan khususnya formulasi menu dan tantangan koordinasi antar pemangku kepentingan. Kedua, observasi partisipatif dilakukan secara berkelanjutan selama 30 hari sekolah pada periode distribusi kritis (09:00–10:00). Lembar observasi digunakan untuk mendokumentasikan ketepatan waktu distribusi, sementara uji organoleptik acak dilakukan pada sampel makanan untuk mengidentifikasi potensi kontaminasi biologis dan fisik. Ketiga, analisis dokumen dilakukan untuk memeriksa pakta integritas dan laporan rekapitulasi keluhan yang dikumpulkan melalui Google Forms yang disediakan oleh SPPG. Pengembangan instrumen penelitian didasarkan pada variabel manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (POAC) dan selaras dengan prosedur analisis kebijakan yang berasal dari kerangka kerja Dunn (Septiana dkk., 2024).

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (82-94)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.30809

Analisis data mengikuti model interaktif yang diusulkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) dan dilakukan secara iteratif sepanjang proses penelitian. Analisis dimulai dengan kondensasi data, yang melibatkan pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari wawancara dan observasi terkait isu-isu seperti kontaminasi larva pada sayuran, distribusi buah yang tidak layak, dan kendala logistik. Selanjutnya, data ditampilkan secara naratif melalui matriks perbandingan lintas tingkat untuk mengidentifikasi pola dan variasi dalam tantangan implementasi di berbagai tingkatan pendidikan, dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Tahap terakhir melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana temuan empiris diperiksa secara kritis terhadap teori analisis kebijakan untuk merumuskan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Untuk memastikan kepercayaan dan meminimalkan bias interpretatif, pengecekan anggota dilakukan dengan membagikan temuan awal kepada kepala sekolah dan perwakilan SPPG untuk validasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi kebijakan Makanan *Bergizi Gratis* (MBG) di berbagai tingkatan pendidikan di Yogyakarta di bawah pengawasan yayasan pendidikan swasta menunjukkan lanskap implementasi yang sangat dinamis. Temuan yang diperoleh dari observasi partisipatif selama 30 hari sekolah berturut-turut menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara harapan kebijakan di tingkat makro dan realitas operasional di tingkat mikro. Bukti lapangan menunjukkan bahwa manajemen operasional masih kurang adaptif terhadap tujuan ambisius yang tertanam dalam kerangka kebijakan gizi nasional (Ramdhan, 2025, t.t.).

Dinamika Perencanaan dan Tindakan Kebijakan Satu Arah

Temuan menunjukkan bahwa selama tahap perencanaan, sekolah sebagian besar berfungsi sebagai penerima pasif keputusan kebijakan. Semua penentuan mengenai komposisi menu, ukuran porsi, dan jadwal distribusi dikendalikan secara terpusat oleh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Dominasi dari atas ke bawah ini menimbulkan ketegangan laten di dalam sekolah. Di tingkat taman kanak-kanak, misalnya, porsi makanan seringkali tidak proporsional dengan kapasitas fisiologis anak usia dini. Observasi mengungkapkan bahwa tekstur makanan, khususnya daging, seringkali terlalu keras dan porsinya terlalu besar, sehingga memerlukan intervensi tambahan dari guru sebelum makanan tersebut dapat dikonsumsi (Viana & Qori'ah, 2024).

Pernyataan dari guru taman kanak-kanak menyoroti kurangnya mekanisme perencanaan komunikatif antara pelaksana kebijakan dan sekolah. Kurangnya konsultasi mengenai preferensi makanan anak-anak mengakibatkan pemborosan makanan yang signifikan dan penurunan tingkat penyelesaian makan. Sebaliknya, di tingkat sekolah menengah atas, masalah utamanya bukanlah ukuran porsi tetapi kesesuaian menu. Kegiatan peramalan gizi gagal memasukkan preferensi makanan siswa dan psikologi konsumen. Akibatnya, banyak siswa secara selektif mengonsumsi lauk pauk sambil membuang makanan pokok dan kemudian membeli makanan tambahan di luar lingkungan sekolah, sehingga merusak tujuan gizi program tersebut (Anggiruling dkk., 2019).

Observasi Implementasi: Inkonsistensi Penjadwalan dan Gangguan Aktivitas Pembelajaran

Observasi naratif pada fase implementasi (*pelaksanaan*) mengidentifikasi inefisiensi logistik sebagai kendala operasional utama. Di tingkat sekolah menengah pertama, distribusi makanan sering terjadi di luar waktu istirahat yang dijadwalkan. Keterlambatan distribusi yang melampaui pukul 10:00 pagi mengganggu dinamika pembelajaran di kelas, karena siswa menunjukkan penurunan konsentrasi akibat kelaparan selama jam pelajaran (Nita dkk., 2021).

Ketika makanan datang terlambat, siswa terlihat mengonsumsi makanan dengan tergesa-gesa untuk menyesuaikan dengan waktu istirahat yang terbatas. Kondisi seperti itu tidak hanya mengganggu kenyamanan fisik siswa tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip perilaku makan sehat. Temuan ini menunjukkan bahwa penjadwalan distribusi gagal memperhitungkan pola kemacetan lalu lintas perkotaan di Yogyakarta. Dari perspektif

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (82-94)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.30809

manajemen, tidak adanya sistem pengiriman *Just-In-Time* secara signifikan mengurangi keandalan layanan dalam penyediaan makanan di sekolah (Dwijayanti, 2024).

Pengawasan dan Keamanan Pangan: Kondisi Empiris di Titik Konsumsi

Temuan paling kritis muncul dalam ranah keamanan pangan dan pengendalian mutu. Pengujian organoleptik acak yang dilakukan di tingkat sekolah dasar Islam mengidentifikasi adanya kontaminasi biologis pada sajian sayuran, termasuk larva utuh yang ditemukan dalam produk yang dimasak. Insiden ini terjadi berulang kali dan menunjukkan adanya kelalaian sistemik dalam pengendalian kebersihan selama persiapan makanan di fasilitas SPPG (Rahmawita dkk., 2018).

Jika dinilai berdasarkan peraturan keamanan pangan nasional, termasuk Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 21 Tahun 2019 tentang batas kontaminasi mikroba dan standar ISO 22000 tentang sistem manajemen keamanan pangan, temuan tersebut merupakan pelanggaran serius. Wawancara dengan kepala sekolah mengungkapkan ketidakpuasan yang kuat terhadap mekanisme pengaduan yang ada. Ketergantungan pada evaluasi digital bulanan melalui Google Forms dianggap tidak efektif dalam menangani insiden keamanan pangan yang mendesak, sehingga sekolah tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan perbaikan segera (Wijaningsih dkk., 2020).

Pengelolaan Pasca-Konsumsi: Beban Operasional Tambahan bagi Sekolah

Aktivitas pasca makan mengungkapkan konsekuensi operasional yang tidak disengaja dari kebijakan MBG. Meskipun penggunaan wadah makanan yang dapat digunakan kembali (*omperg*) mencerminkan prinsip keberlanjutan lingkungan, pengelolaan wadah tersebut memberikan beban yang cukup besar pada sekolah. Di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama, guru dan petugas kebersihan diharuskan untuk mengoordinasikan pembersihan wadah dalam skala besar karena persyaratan SPPG untuk mengembalikan wadah dalam kondisi yang relatif bersih (Hastuti, 2023).

Mengingat infrastruktur sanitasi yang terbatas dan personel kebersihan yang tidak mencukupi, para guru sering kali terpaksa memikul tanggung jawab tambahan di luar tugas pengajaran. Pergeseran ini mengalihkan perhatian dari tugas-tugas pedagogis dan secara efektif mengubah sekolah menjadi pusat sanitasi sementara. Yang perlu diperhatikan, tuntutan operasional tambahan ini tidak disertai dengan dukungan kompensasi atau peningkatan fasilitas dari yayasan maupun otoritas pemerintah.

Analisis Perbandingan Lintas Tingkat

Secara keseluruhan, studi ini mengungkapkan pola tantangan implementasi yang berbeda di berbagai tingkatan pendidikan. Di tingkat yang lebih rendah (taman kanak-kanak dan sekolah dasar Islam), risiko keamanan pangan dan tekstur makanan yang tidak sesuai muncul sebagai perhatian utama. Sebaliknya, di tingkat yang lebih tinggi (sekolah menengah pertama dan atas), ketepatan waktu distribusi dan kecukupan porsi menjadi isu dominan. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa ketiadaan standar operasional yang berbeda di berbagai tingkatan pendidikan melanggengkan ketidaksesuaian struktural dalam penyampaian program.

Kegagalan dalam fungsi pengendalian (pengawasan) diidentifikasi sebagai kelemahan paling kritis. Tanpa pembentukan tim pengawasan harian di lokasi, sekolah tetap rentan terhadap risiko gizi dan kegagalan implementasi. Evaluasi digital bulanan terbukti tidak cukup sebagai instrumen kontrol, karena kurang mampu menanggapi insiden yang mendesak dan berisiko tinggi. Akibatnya, program MBG berisiko berubah menjadi eksperimen kebijakan yang tidak terkendali dengan implikasi signifikan terhadap kesehatan siswa dan kepercayaan institusional.

Pembahasan

Interpretasi temuan lapangan mengenai implementasi kebijakan Makanan *Bergizi Gratis* (MBG) di Yogyakarta mengungkapkan tingkat kompleksitas yang melampaui masalah logistik pangan semata. Dilihat melalui lensa prosedur analisis kebijakan, efektivitas suatu tindakan kebijakan bergantung pada keselarasan antara aktivitas intelektual seperti analisis berbasis bukti dan aktivitas politik, yaitu pengambilan keputusan yang berwenang. Diskusi ini secara kritis mengkaji bagaimana kendala operasional

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (82-94)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.30809

di berbagai tingkatan pendidikan muncul dari ketidakselarasan struktural antara mandat peraturan dan realitas teknis dalam pengaturan implementasi (Hastuti, 2023).

Struktur Masalah dan Kegagalan Intelektual dalam Perumusan Kebijakan

Tahap awal dalam prosedur analisis kebijakan melibatkan penstrukturan masalah. Dalam konteks program MBG di Yogyakarta, masalah yang diartikulasikan secara politis berpusat pada "memenuhi kebutuhan gizi nasional dalam mendukung Visi Indonesia 2045." Namun, pada tingkat intelektual, terdapat kegagalan yang nyata untuk menerjemahkan tujuan luas ini ke dalam definisi masalah yang konkret dan spesifik lokasi. Isu-isu empiris yang diidentifikasi di lapangan seperti kontaminasi biologis yang ditemukan pada sajian sayuran di MI Qurrota A'yun tidak boleh diartikan hanya sebagai kesalahan teknis dalam prosedur pencucian makanan. Sebaliknya, hal itu mewakili kelemahan sistemik dalam standar keamanan pangan yang tertanam dalam perencanaan operasional (Zaenab & Azizah, 2025).

Demikian pula, ketidaksesuaian antara ukuran porsi yang ditentukan oleh SPPG dan kapasitas fisiologis siswa taman kanak-kanak mencerminkan kesalahan identifikasi kelompok sasaran. Aktivitas intelektual dalam perumusan kebijakan seharusnya memasukkan diferensiasi di berbagai tingkatan pendidikan. Di tingkat taman kanak-kanak, perhatian utama berkaitan dengan penerimaan makanan, termasuk tekstur dan rasa, sedangkan di tingkat sekolah menengah atas, masalahnya bergeser ke arah kecukupan energi dan kecukupan porsi. Memperlakukan semua tingkatan pendidikan secara seragam di bawah pendekatan terpusat dan dari atas ke bawah menghasilkan inefisiensi, terutama dalam bentuk peningkatan pemborosan makanan.

Temuan ini konsisten dengan teori manajemen kebijakan yang menekankan bahwa definisi masalah yang salah pasti mengarah pada solusi kebijakan yang tidak efektif atau tidak relevan (Sinta dkk., 2024). Tinjauan sistematis di kawasan Eropa dan Pasifik Barat menemukan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap kebijakan pangan sekolah seringkali berakar pada kegagalan dalam mendefinisikan target penerima manfaat secara spesifik dan kontekstual, sehingga intervensi yang dirancang secara seragam justru menghasilkan inefisiensi di lapangan. (Mostert, 2021) juga menegaskan bahwa persepsi negatif siswa terhadap kualitas, variasi, dan kecukupan makanan sekolah secara langsung berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi, yang pada akhirnya melemahkan tujuan program secara keseluruhan.

Analisis Hukum: Inkonsistensi dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024

Dari perspektif formal-hukum, kebijakan MBG berlandaskan kuat pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Pasal 2 peraturan tersebut secara eksplisit mewajibkan pemenuhan standar gizi nasional. Namun, temuan empiris kontaminasi biologis menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban keamanan pangan. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (b) memberikan tanggung jawab kepada badan tersebut untuk menetapkan norma, standar, dan kriteria tata kelola gizi, termasuk persyaratan kebersihan dan sanitasi yang sesuai dengan peraturan keamanan pangan nasional (Noviana dkk., 2024).

Penemuan barang-barang makanan yang terkontaminasi menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian mutu yang diamanatkan oleh peraturan tersebut belum secara efektif didesentralisasikan ke tingkat fasilitas produksi makanan yang dioperasikan oleh SPPG. Kegiatan intelektual yang bertujuan untuk memverifikasi kualitas makanan telah gagal memastikan standar keamanan konsumsi, suatu kondisi yang secara hukum dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran hak mahasiswa atas makanan yang aman. Selain itu, Pasal 44 menekankan koordinasi dan pemantauan efektivitas kebijakan. Ketergantungan pada pengajuan pengaduan bulanan melalui Google Forms di Yogyakarta bertentangan dengan prinsip akuntabilitas yang diuraikan dalam peraturan tersebut. Tidak adanya kebijakan penggantian makanan segera merupakan celah manajerial yang kritis, yang semakin menjauhkan praktik operasional dari mandat hukum (Mozin dkk., 2025).

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (82-94)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.30809

Peramalan Kebijakan dan Implikasi Logistik

Dalam kerangka analisis kebijakan, peramalan (*forecasting*) berfungsi sebagai aktivitas intelektual untuk mengantisipasi konsekuensi dari tindakan kebijakan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan secara penuh (Dunn, 2015). Peramalan yang efektif mensyaratkan adanya analisis berbasis data terhadap variabel-variabel eksternal yang dapat memengaruhi kelancaran distribusi layanan publik. Temuan menunjukkan bahwa kegiatan peramalan yang dilakukan oleh penyedia layanan gizi tidak memadai dalam mengurangi risiko eksternal, khususnya kemacetan lalu lintas perkotaan di Yogyakarta. Kekurangan ini mengakibatkan waktu pengiriman yang tidak konsisten, berkisar antara pukul 09.30 hingga 10.15, yang terbukti mengganggu jadwal sekolah yang ketat, terutama di tingkat SMP dan SMA (Fatimah dkk., 2024).

Secara teoritis, peramalan yang efektif dalam manajemen layanan makanan seharusnya menggunakan model *Just-In-Time* (JIT) untuk memastikan makanan tiba dalam kisaran suhu yang aman, biasanya di atas 60°C. Keterlambatan pengiriman yang terus-menerus menunjukkan bahwa peramalan logistik tidak didasarkan pada data spasial dan temporal yang akurat. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian (Bitler, Currie, Hoynes, Ruffini, Schulkind, & Willage, 2025) yang menunjukkan bahwa efektivitas program makan sekolah sangat ditentukan oleh ketepatan waktu akses siswa terhadap makanan; keterlambatan distribusi tidak hanya memengaruhi asupan kalori tetapi juga berdampak pada perubahan perilaku makan siswa secara keseluruhan, termasuk kecenderungan mengonsumsi makanan pengganti yang kurang bergizi (Karpouzis, Anastasiou, Lindberg, Walsh, Shah, & Ball, 2025). Lebih lanjut, (Kempler, Cameron, Nanayakkara, Booth, & Margerison, 2025) dalam studinya di Australia menegaskan bahwa hambatan logistik dan inkonsistensi waktu distribusi merupakan salah satu faktor penentu utama dalam keberhasilan program makan siang berbasis sekolah, dan kegagalan dalam perencanaan logistik akan menciptakan beban tambahan bagi tenaga pendidik sekaligus mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap program. Akibatnya, ketegangan politik muncul antara sekolah dan penyedia layanan, karena sekolah merasakan penurunan konsentrasi belajar siswa akibat keterlambatan makan. Kegagalan ini menggambarkan bagaimana dimensi intelektual dari desain kebijakan seringkali tunduk pada tekanan politik untuk implementasi yang cepat, bahkan tanpa adanya sistem logistik yang tepat (Miranti dkk., 2024).

Secara teoritis, peramalan yang efektif dalam manajemen layanan makanan seharusnya menggunakan model *Just-In-Time* (JIT) untuk memastikan makanan tiba dalam kisaran suhu yang aman, biasanya di atas 60°C. Keterlambatan pengiriman yang terus-menerus menunjukkan bahwa peramalan logistik tidak didasarkan pada data spasial dan temporal yang akurat. Akibatnya, ketegangan politik muncul antara sekolah dan penyedia layanan, karena sekolah merasakan penurunan konsentrasi belajar siswa akibat keterlambatan makan. Kegagalan ini menggambarkan bagaimana dimensi intelektual dari desain kebijakan seringkali tunduk pada tekanan politik untuk implementasi yang cepat, bahkan tanpa adanya sistem logistik yang tepat (Miranti dkk., 2024).

Pemantauan sebagai Instrumen Kontrol yang Lemah

Dalam prosedur analisis kebijakan, pemantauan (*monitoring*) berfungsi sebagai mekanisme sentral untuk menjaga agar implementasi kebijakan tetap berada pada jalur yang ditetapkan dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Dunn, 2015). Pemantauan yang efektif mensyaratkan sistem pengawasan berlapis yang beroperasi secara berkelanjutan, bukan hanya pada titik akhir distribusi tetapi juga pada seluruh rantai produksi makanan. Namun, dalam praktiknya, pemantauan dalam program MBG di Yogyakarta telah direduksi menjadi formalitas prosedural. Temuan berulang berupa sayuran yang terkontaminasi dan buah yang busuk menunjukkan tidak adanya sistem

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (82-94)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.30809

pemantauan berlapis. Guru secara efektif dipaksa untuk mengambil peran sebagai "pengawas gizi" tanpa instrumen yang memadai untuk pengujian organoleptik atau penilaian keamanan pangan (Rayhan & Zulham, 2025).

Kondisi ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya, seperti Suaida et al. (2020), yang mengidentifikasi kebersihan sanitasi sebagai penentu penting keamanan pangan. (Matela, Yadav, & Menon, 2024) melalui tinjauan sistematis pada kebijakan pangan sekolah di kawasan Eropa dan Pasifik Barat secara konsisten menemukan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap standar keamanan pangan berkorelasi erat dengan lemahnya mekanisme pemantauan di tingkat sekolah, dan bahwa intervensi pendukung yang sistematis terbukti secara signifikan meningkatkan kepatuhan kebijakan serta memperbaiki kualitas lingkungan pangan sekolah. Ketika pemantauan terbatas pada inspeksi visual yang dangkal, risiko kesehatan siswa meningkat secara substansial. (Zailani, Owolabi, & Sallau, 2023) dalam studinya mengenai program makan sekolah di Nigeria menunjukkan bahwa tanpa pemantauan nutrisi yang terstandar dan konsisten di seluruh rantai distribusi, kontribusi makanan sekolah terhadap kebutuhan gizi harian siswa dapat jauh di bawah ambang minimal yang direkomendasikan, khususnya untuk zat gizi mikro penting seperti vitamin A, serat, dan vitamin C. Pemantauan harus dilakukan di hulu, di fasilitas produksi makanan, sesuai dengan standar ISO 22000. Tidak adanya pengawasan hulu yang ketat memungkinkan produk cacat mencapai siswa, yang mencerminkan rendahnya tingkat akuntabilitas penyedia terhadap yayasan pengelola dari perspektif tata kelola politik (Kurdanti dkk., 2020).

Evaluasi dan Penilaian Kinerja: Kritik terhadap Digitalisasi Asinkron

Evaluasi dalam kerangka analisis kebijakan berfungsi untuk menilai sejauh mana tindakan kebijakan telah menghasilkan nilai atau manfaat yang diharapkan, sekaligus memberikan informasi bagi tindakan korektif (Dunn, 2015). Evaluasi yang efektif bersifat responsif, berkelanjutan, dan mampu menangkap perubahan pada tingkat operasional secara tepat waktu. Ketergantungan saat ini pada evaluasi bulanan yang dilakukan melalui Google Forms secara intelektual tidak memadai untuk program yang melibatkan distribusi makanan harian. Kebijakan terkait pangan membutuhkan mekanisme evaluasi secara *real-time*; keterlambatan dalam evaluasi membuat insiden di awal bulan menjadi tidak dapat diperbaiki (Zulaika dkk., 2025).

Evaluasi bulanan semacam itu berfungsi terutama sebagai instrumen politik untuk memenuhi persyaratan pelaporan birokrasi daripada sebagai alat untuk perbaikan substantif. (Cohen, Chapman, Olarte, Hecht, Hecht, Minc, Ohri-Vachaspati, Orta-Aleman, Patel, Polacsek, Ritchie, Zuercher, & Gosliner, 2025) dalam evaluasi kebijakan makan gratis universal di Massachusetts menemukan bahwa mekanisme evaluasi yang responsif dan inklusif terhadap persepsi seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua lintas kategori pendapatan, terbukti menghasilkan perbaikan kebijakan yang lebih substansial dan secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap keberlangsungan program. Studi ini berpendapat untuk mengganti model saat ini dengan aplikasi pemantauan waktu nyata atau sistem pelaporan berbasis saluran telepon. Sesuai dengan kritik dalam literatur tata kelola digital, digitalisasi saja tidak menjamin efektivitas kecuali disertai dengan responsivitas kelembagaan. (Petersen, Bryant, Concha, Firman, Hawking, Jama, Mansukoski, Oyebode, Robert, Scammell, Toffolutti, Twite, & Dezateux, 2025) dalam studi longitudinal terhadap skema makan gratis universal di London menunjukkan bahwa dampak positif program terhadap capaian akademik siswa baru terlihat secara signifikan setelah beberapa tahun implementasi yang konsisten dan dievaluasi secara berkelanjutan, menggarisbawahi bahwa evaluasi jangka pendek yang bersifat administratif tidak memadai untuk

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (82-94)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.30809

menilai dampak nyata kebijakan gizi sekolah. Evaluasi yang tertunda secara efektif meniadakan fungsi korektif dari penilaian kinerja (Andi Muh. Dzul Fadli dkk., 2022).

Perumusan Kebijakan dan Sintesis Lintas Tingkat

Sebagai tahap akhir dari siklus analisis kebijakan, perumusan rekomendasi (*policy recommendation*) merupakan puncak dari aktivitas intelektual yang mengintegrasikan seluruh temuan empiris ke dalam usulan tindakan yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan oleh para pengambil keputusan (Dunn, 2015). Rekomendasi kebijakan yang baik harus bersifat spesifik terhadap konteks, berbasis bukti, dan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan yang tersedia. Rekomendasi penting yang muncul dari studi ini adalah implementasi Klausul Jaminan Layanan. Secara hukum dan politik, yayasan pengelola harus memiliki wewenang eksplisit untuk menuntut penggantian makanan segera ketika makanan terbukti tidak layak konsumsi. Tanpa wewenang tersebut, sekolah tetap menjadi penerima pasif kegagalan kebijakan (Bahtiar, 2020).

Sintesis temuan lintas tingkatan menunjukkan bahwa siswa yang lebih muda (tingkat TK dan SD Islam) menunjukkan kerentanan yang lebih besar terhadap masalah kualitas fisik makanan, sementara siswa yang lebih tua (tingkat SMP dan SMA) lebih terpengaruh oleh waktu distribusi dan kecukupan porsi. (Zuercher, Orta-aleman, French, Hecht, Hecht, Cohen, Polacsek, Schwartz, Ritchie, & Gosliner, 2026) secara empiris membuktikan bahwa peningkatan kualitas, variasi, dan kecukupan makanan sekolah yang disesuaikan dengan karakteristik dan preferensi kelompok usia siswa secara signifikan meningkatkan partisipasi dan mendorong perbaikan status gizi siswa dalam jangka panjang, sehingga kebijakan yang seragam tanpa diferensiasi jenjang terbukti kontraproduktif. Oleh karena itu, kebijakan MBG harus bergeser dari model distribusi seragam menuju pendekatan berbasis kebutuhan dan spesifik tingkatan. (Springmann, Hansoge, Schultz, Pastorino, & Bundy, 2025) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa perluasan cakupan program makan sekolah yang disertai dengan penyesuaian komposisi menu berdasarkan kebutuhan kelompok usia dan standar gizi yang direkomendasikan berpotensi mencegah lebih dari satu juta kasus penyakit tidak menular per tahun secara global, sekaligus menurunkan separuh dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sistem pangan sekolah yang tidak terstandar. Prosedur analisis kebijakan yang kuat adalah prosedur yang secara aktif menggabungkan umpan balik akar rumput dan menerjemahkan masukan ini ke dalam penyesuaian strategis dalam siklus kebijakan selanjutnya. Tanpa memperkuat aktivitas intelektual dalam peramalan, pemantauan, dan evaluasi, upaya untuk mencapai transformasi gizi bagi generasi masa depan Indonesia berisiko terhambat oleh kekurangan teknis yang dapat dicegah (Miftah dkk., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 1, pengelolaan kebijakan Makanan *Bergizi Gratis* (MBG) di berbagai jenjang pendidikan di Yogyakarta terus menghadapi kendala struktural yang substansial, terutama dalam hal responsivitas sistem dan penjaminan mutu yang komprehensif. Berdasarkan bukti empiris yang diperoleh melalui observasi mendalam di unit TK, SD Islam, SMP, dan SMA, penelitian ini telah memenuhi tujuannya untuk menguji efektivitas prosedur kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa fungsi pengendalian merupakan komponen yang paling kritis dan kurang berkembang dalam implementasi kebijakan. Meskipun program ini telah mencapai keberhasilan politik dalam melaksanakan distribusi makanan skala besar, aktivitas intelektual terkait peramalan dan pemantauan terbukti tidak memadai dalam mengurangi risiko kontaminasi biologis dan inkonsistensi jadwal pengiriman yang mengganggu jadwal akademik (Huda dkk., 2025).

Perbedaan mencolok antara mandat normatif Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (82-94)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.30809

2024 dan realitas operasional yang dibuktikan dengan ditemukannya larva dalam hidangan sayuran dan distribusi buah-buahan yang tidak layak konsumsi menyoroti kesenjangan signifikan dalam manajemen keamanan pangan yang secara langsung mengancam hak kesehatan siswa. Secara logis, temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan model kebijakan seragam yang berlaku untuk semua, tanpa diferensiasi berdasarkan kebutuhan nutrisi dan tekstur makanan di berbagai tingkatan pendidikan, mengakibatkan efisiensi program yang rendah dan tingkat pemborosan makanan yang tinggi di lingkungan sekolah (Suprapto & Arda, 2021).

Implikasi dari temuan ini sangat luas, secara teoritis berkontribusi pada kemajuan analisis kebijakan publik dan secara praktis pada peningkatan tata kelola gizi nasional. Oleh karena itu, studi ini menyerukan pergeseran paradigma dari pendekatan manajemen bulanan yang berorientasi administratif menuju sistem manajemen yang responsif, berbasis data, dan real-time. Lembaga pendidikan dan sekolah didesak untuk membentuk Tim Pemantauan Harian lintas tingkat yang diberi wewenang politik untuk melakukan pengujian organoleptik independen dan menolak pengiriman makanan yang gagal memenuhi standar kualitas sebelum sampai ke siswa (Sarjito, 2024).

Bersamaan dengan itu, Satuan Pelayanan Program *Gizi* (SPPG) harus melakukan reformasi substansial terhadap Prosedur Operasi Standar (SOP) hulu, khususnya dalam proses pencucian dan pengemasan, dan mengganti evaluasi berbasis *Google Form* yang asinkron dengan sistem *hotline* pengaduan instan. Lebih lanjut, sangat penting bagi badan pemerintah dan yayasan pengelola untuk memasukkan Klausul Jaminan Layanan yang eksplisit dan kebijakan penggantian makanan segera ke dalam semua perjanjian kontrak. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegagalan kualitas yang teridentifikasi pada hari tertentu segera ditangani melalui tindakan korektif, sehingga melindungi martabat siswa sebagai penerima manfaat kebijakan dan mencegah kelemahan operasional merusak visi yang lebih luas tentang transformasi gizi menuju Visi Indonesia 2045.

Dengan adanya langkah-langkah perbaikan ini, kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis diharapkan dapat beroperasi lebih berkelanjutan dan berfungsi sebagai katalisator nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di semua tingkatan pendidikan di Yogyakarta.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian Implementasi Kebijakan MBG

No	Aspek Manajemen Kebijakan	Temuan Utama	Sumber Data
1	Perencanaan (*Planning*)	Perencanaan menu, porsi, dan jadwal distribusi bersifat *top-down* oleh SPPG tanpa pelibatan sekolah lintas jenjang.	Kepala Sekolah, Guru Koordinator Gizi
2	Pelaksanaan (*Actuating*)	Terjadi inkonsistensi waktu distribusi (09.30–10.15 WIB) yang mengganggu KBM serta ketidaksesuaian menu dengan karakteristik usia siswa.	Observasi lapangan, Siswa, Guru
3	Pengawasan (*Controlling*)	Ditemukan kontaminasi biologis (ulat) dan buah tidak layak konsumsi; mekanisme pengawasan harian belum tersedia.	Observasi, Kepala Sekolah
4	Evaluasi	Evaluasi bulanan berbasis Google Form tidak responsif terhadap insiden harian dan bersifat administratif.	Dokumentasi, Wawancara
5	Dampak Kebijakan	Menurunnya kenyamanan belajar, meningkatnya potensi food waste, dan beban operasional tambahan bagi sekolah.	Seluruh Informasi

Source: (Sumber: Data Primer Diolah (2024)

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (82-94)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.30809

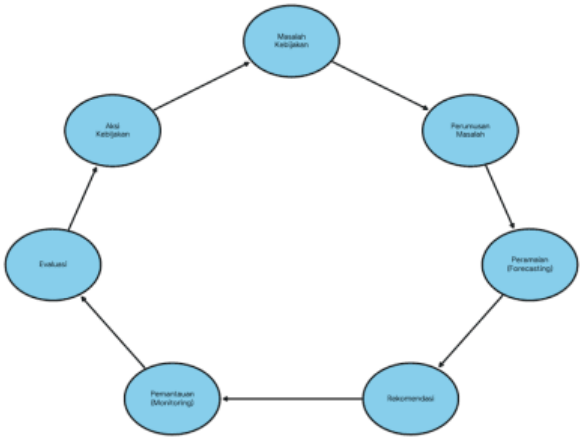


Figure 1. Prosedur Analisis Kebijakan Program MBG
Source: Diadaptasi dari Dunn (2015) mengenai prosedur analisis kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

Andi Muh. Dzul Fadli, Nartin, Rahmatyah, S., Arfah, J., Crisbiantoro, J., & Milyan. (2022). Hidden Power: Dynasty Politics In Konawe Regency? Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal, 12(2), 191–201. Https://Doi.Org/10.31289/Jap.V12i2.8086

Anggiruling, D. O., Ekayanti, I., & Khomsan, A. (2019). Analisis Faktor Pemilihan Jajanan, Kontribusi Gizi Dan Status Gizi Siswa Sekolah Dasar. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, 15(1), 81. Https://Doi.Org/10.30597/Mkmi.V15i1.5914

Bahtiar, R. A. (2020). Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce Di Indonesia [Potency, Government Role, And Challenges Of E-Commerce Development In Indonesia]. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 11(1), 13–25. Https://Doi.Org/10.22212/Jekp.V11i1.1485

Bitler, M., Currie, J., Hoynes, H., Ruffini, K., Schulkind, L., & Willage, B. (2025). Effects of school meals on nutrition: Evidence from the start of the school year. Food Policy, 134, 102901. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2025.102901

Cohen, J. F. W., Chapman, L. E., Olarte, D. A., Hecht, C. A., Hecht, K., Minc, L., Ohri-Vachaspati, P., Orta-Aleman, D., Patel, A. I., Polacsek, M., Ritchie, L. D., Zuercher, M. D., & Gosliner, W. (2025). Perceived Influence of a State-Level Universal Free School Meal Policy on Households With Varying Income Levels: An Analysis of Parental Perspectives. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 125(10), 1425-1433.e4. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jand.2024.10.001

Karpouzis, F., Anastasiou, K., Lindberg, R., Walsh, A., Shah, S., & Ball, K. (2025). Systematic Review Effectiveness of School-based Nutrition Education Programs that Include Environmental Sustainability Components, on Fruit and Vegetable Consumption of 5 − 12YearOld Children: A Systematic Review. Journal of Nutrition Education and Behavior, 57(7), 627–642. https://doi.org/10.1016/j.jneb.2025.02.008

Dewi, N. P. S. P., Aprianie, W., & Romaidha, I. (2024). Uji Kandungan Coliform Dan Escherichia Coli Pada Jajanan Cilok Yang Di Jual Di Sekolah Dasar 6 Raja Pangkalan Bun. Jurnal Borneo Cendekia, 7(2), 62–68.

Dwijayanti, A. (2024). Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis Terhadap Sektor Pertanian. Jurnal Administrasi Publik, 20(2), 281–308. Https://Doi.Org/10.52316/Jap.V20i2.435

Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis Di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, Dan Solusi Untuk Ketahanan Pangan. Journal Of Governance And Policy Innovation, 4(1), 14–21. Https://Doi.Org/10.51577/Jgpi.V4i1.641

Hastuti, R. D. (2023). Persepsi Guru Terhadap Pendekatan Ilmiah Di Sekolah Dasar. Elementary Education Journal, 3(1), 21–29. Https://Doi.Org/10.53088/Eej.V3i1.1734

Huda, S., Sholeh, M., Karwanto, & Khamidi, A. (2025). Pengaruh Kepemimpinan Situasional, Budaya Organisasi, Dan Efikasi Diri Terhadap Kinerja Guru Di SMK Negeri 5 Surabaya. Jurnal Manajemen Pendidikan: Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan, 7(2), 1–11. Https://Doi.Org/10.21831/Jump.V7i2.88618

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (82-94)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.30809

Jannah, A. M., Kurnia, E., & Yulianto, W. (2025). Literatur Review: Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia. Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia, 4(1), 70–79. Https://Doi.Org/10.32660/Jarsi.V4i1.884

Kempler, J. V., Cameron, G., Nanayakkara, J., Booth, A. O., & Margerison, C. (2025). Serving up change: teacher perspectives about a school-provided lunch program in Victoria, Australia. British Food Journal, 127(13), 301–321. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2024-1141

Kurdanti, W., Khasana, T. M., & Wayansari, L. (2020). Lingkar Lengan Atas, Indeks Massa Tubuh, Dan Tinggi Fundus Ibu Hamil Sebagai Prediktor Berat Badan Lahir. Jurnal Gizi Klinik Indonesia, 16(4), 168. Https://Doi.Org/10.22146/Ijcn.49314

Lendra, I. W., Husni, D., & Fitriani, Y. (2025). Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai Good Governance: Analisis Kualitatif Dalam Administrasi Publik. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 5(1), 937–945. Https://Doi.Org/10.57250/Ajsh.V5i1.1252

Lestari, G. M., & Yuwono, T. (2025). Collaborative Governance Dalam Implementasi Kebijakan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (Pmt-As) Di Jakarta Selatan Periode 2019 – 2023. Journal Of Politic And Government Studies, 14(3), 87–98.

Matela, H., Yadav, S. S., & Menon, K. (2024). Robust implementation of school food policy is needed to improve nutritional outcomes of children in European and Western Pacific countries: A systematic review. Nutrition, 122, 112373. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.nut.2024.112373

Miftah, M. Z., Widiati, U., Wulyani, A. N., & Suzila, T. I. (2024). Preservice Teachers' Pedagogical Competence And Transformation Learning In A Dual Online-Offline Teaching Practicum. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 43(2), 381–397. Https://Doi.Org/10.21831/Cp.V43i2.54371

Miranti, H., Muhammad Rizal Zaenullloh, M. P., & Arif Ahmad Fauzi, M. P. (2024). Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan (Pmt) Bubur Kacang Hijau Terhadap Kesehatan Dan Gizi Anak Usia 4-6 Tahun Di Paud AL-HUSNA BOGOR. Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Ekonomi, 2(2), 79–84. Https://Doi.Org/10.62495/Jpime.V2i2.30

Mozin, S. Y., Dumbela, U. S., Lestari, D. A., Ramadhani, R., & Noho, N. N. (2025). Peran Statistik Administrasi Dalam Evaluasi Kebijakan Publik: Studi Literatur. JPS: Journal Of Publicness Studies, 2(2), 105–116.

Mostert, C. M. (2021). The impact of the school feeding programme on the education and health outcomes of South African children. Children and Youth Services Review, 126, 106029. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106029

Nita, M. H. D., Loaloka, M. S., Pantaleon, M. G., & Nenotek, C. R. (2021). Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (Pmt-As) Berbasis Pangan Lokal Dalam Meningkatkan Status Gizi Siswa Sekolah Dasar Negeri Batuinan, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Kepulauan Lahan Kering, 2(2), 54–61. Https://Doi.Org/10.51556/Jpkmkelaker.V2i2.162

Noviana, F., Nurlaela, R. S., Audrey, N. A., & Aisha, P. S. (2024). Pengaruh Standarisasi Mutu Pangan Terhadap Keamanan Dan Kesehatan Konsumen. Karimah Tauhid, 3(7), 7318–7324. Https://Doi.Org/10.30997/Karimahtauhid.V3i7.14063

Petersen, J., Bryant, M., Concha, N., Firman, N., Hawking, M. K. D., Jama, S., Mansukoski, L., Oyebode, O., Robert, A., Scammell, K., Toffolutti, V., Twite, S., & Dezateux, C. (2025). Impacts of discretionary universal free school meal schemes on primary school children ' s education attainment and school absence : A natural experiment study in England. International Journal of Educational Research, 133(June), 102713. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2025.102713

Rahmawita, R., Putri, D. H., & Advinda, L. (2018). Kualitas Jajanan Anak Sekolah Dasar Secara Mikrobiologi Di Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat. Biomedika, 10(2), 102–106. Https://Doi.Org/10.23917/Biomedika.V10i2.7020

Ramdhan, 2025. (T.T.). Metode Peneliatian Kualitatif (Teori, Teknik, Dan Aplikasi).

Rayhan, M., & Zulham. (2025). Implementasi Jaminan Halal Pada Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Di Kecamatan Medan Timur. Al-Sulthaniyah, 14(2), 370–380. Https://Doi.Org/10.37567/Al-Sulthaniyah.V14i2.4154

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (82-94)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.30809

Sari, Y. D., & Rachmawati, R. (2020). Kontribusi Zat Gizi Makanan Jajanan Terhadap Asupan Energi Sehari Di Indonesia (Analisis Data Survey Konsumsi Makanan Individu 2014) [Food Away From Home (Fafh) Contribution Of Nutrition To Daily Total Energy Intake In Indonesia]. Penelitian Gizi Dan Makanan (The Journal Of Nutrition And Food Research), 43(1), 29–40. Https://Doi.Org/10.22435/Pgm.V43i1.2891

Sarjito, A. (2024). Memahami Dinamika Administrasi Publik Dan Implementasi Kebijakan. Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, 5(2), 76–88. Https://Doi.Org/10.55542/Saraqopat.V5i2.670

Septiana, N. N., Khoiriyah, Z., & Shaleh. (2024). Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif. Didaktik : Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang, 10(04), 233–243. Https://Doi.Org/10.36989/Didaktik.V10i04.5181

Sinta, F., Hambali, Rizki, M., Alfiani, N. I., Ramadhani, V., & Husna, Z. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Pada Anak Di Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan. Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan, 2(2), 187–192.

Suprapto, S., & Arda, D. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas, 1(2), 77–87. Https://Doi.Org/10.25311/Jpkk.Vol1.Iss2.957

Springmann, M., Hansoge, M. P., Schultz, L., Pastorino, S., & Bundy, D. A. P. (2025). The health, environmental, and cost implications of providing healthy and sustainable school meals for every child by 2030: a global modelling study. 9(November), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.lanplh.2025.06.002

Talitha, S. R., Hendriawan, D., & Arzaqi, R. N. (2025). Implementasi Media Coding Pada Computational Thinking Anak Usia Dini: Sebuah Literatur Review. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 9(6), 3592–3603. Https://Doi.Org/10.31004/Obsesi.V9i6.7821

Viana, R. O., & Qori'ah, M. (2024). Strategi Guru Dalam Penerapan Program Snack Sehat Untuk Pencegahan Stunting Pada Anak Usia Dini. Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 4(2), 144–153. Https://Doi.Org/10.32665/Abata.V4i2.3390

Wijaningsih, W., Subandriani, D. N., & Kes, M. (2020). Keamanan Pangan Berdasarkan Skor Keamanan Pangan (Skp) Kantin Kampus Di Kota Semarang.

Zaenab, Z., & Azizah, N. (2025). Personal Hygiene Dan Sanitasi Tempat Pengolahan Terhadap Kualitas Bakteriologis Makanan Jajanan Di Pasar Cidu Kota Makassar. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, 24(2), 209–216.

Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). Tantangan Implementasi Dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 1(03), 426–435.

Zailani, H., Owolabi, O. A., & Sallau, A. B. (2023). Contribution of school meals to the recommended nutrient and energy intake of children enrolled in the National Homegrown School Feeding Program in Zaria, Nigeria. Archives de Pédiatrie, 30(7), 471–476. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.arcped.2023.07.004

Zuercher, M. D., Orta-aleman, D., French, C. D., Hecht, C. A., Hecht, K., Cohen, J. F. W., Polacsek, M., Schwartz, M. B., Ritchie, L. D., & Gosliner, W. (2026). Student Perceptions of School Lunch and Their Association With Self-Reported Participation in School Meal Programs. Journal of Nutrition Education and Behavior, 58(4), 336–345. https://doi.org/10.1016/j.jneb.2025.12.012